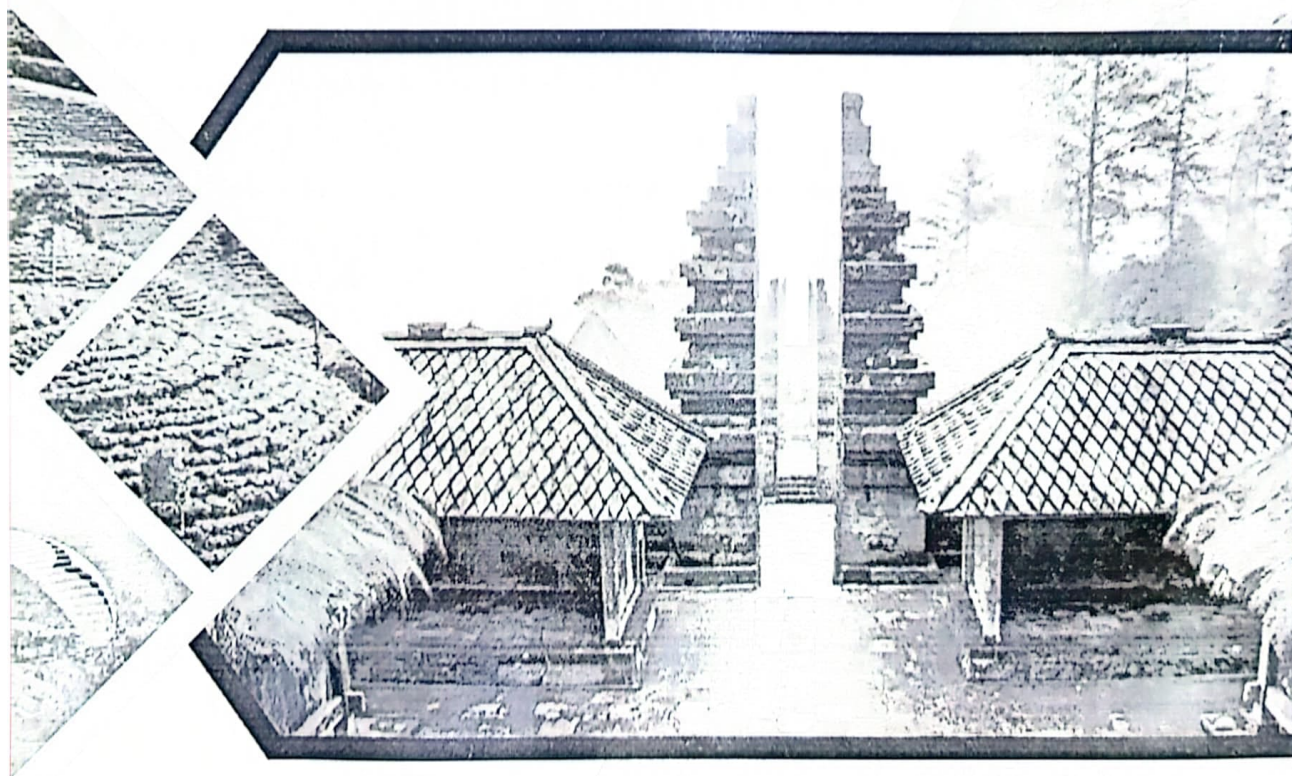


LPT

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS

TAHUN **2024**



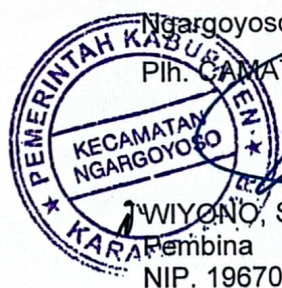
**KECAMATAN NGARGOYOSO
KABUPATEN KARANGANYAR**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan hidayahNya sehingga Laporan Pelaksanaan Tugas Tahun 2024 ini telah dapat disusun. Laporan Pelaksanaan Tugas ini merupakan perwujudan tanggung jawab Camat dalam memenuhi tugas dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan.

Menyadari bahwa masih ada berbagai kekurangan dalam laporan ini dan adanya program kerja yang belum sepenuhnya tercapai secara optimal, maka guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat maka kami mengharapkan adanya saran, masukan yang konstruktif guna peningkatan kinerja instansi Kecamatan Ngargoyoso.

Selanjutnya kami berharap semoga Laporan Pelaksanaan Tugas Tahun 2024 yang kami susun dapat bermanfaat bagi Kecamatan Ngargoyoso dan masyarakat pada umumnya.

Ngargoyoso, Januari 2025
Pih. CAMAT NGARGOYOSO

WIYONO, S.Sos, M.Si
Pembina
NIP. 19670509 198903 1 010



DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. DASAR HUKUM	3
C. MAKSUD DAN TUJUAN	4
BAB II DESKRIPSI UNIT KERJA	6
A. TUGAS DAN FUNGSI	6
B. STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)	7
C.. PERDA/PERBUB YANG BERKAITAN DENGAN	7
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN	
D. STRUKTUR ORGANISASI	8
E. KEPEGAWAIAN	8
BAB III CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)	12
BAB IV HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN	
PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN	
DAERAH	13
A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN	13
PEMERINTAHAN DAERAH	
 BAB V TUGAS PEMBANTUAN.....	 24
BAB VI STANDAR PELAYANAN MINIMAL	25
BAB VII INOVASI DAN PENGHARGAAN	26
BAB VIII PENUTUP	
A. KESIMPULAN	27
B. SARAN	27

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kecamatan Ngargoyoso adalah salah satu dari 17 Kecamatan yang ada di Kabupaten Karanganyar, yang merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah. Di sebelah utara wilayahnya berbatasan dengan Kecamatan Kerjo, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Jenawi, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Tawangmangu dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Karangpandan.

Di Kecamatan Ngargoyoso terdapat 9 (sembilan) desa yaitu Desa Puntukrejo, Desa Berjo, Desa Girimulyo, Desa Segorogunung, Desa Kemuning, Desa Nglegok, Desa Dukuh, Desa Jatirejo dan Desa Ngargoyoso. Bersama dengan desa-desa, Kecamatan Ngargoyoso berkoordinasi secara intensif di berbagai bidang yang menunjang tugas pemerintahan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan urusan pemerintahan secara tepat waktu kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pada tahun 2024 Kecamatan Ngargoyoso mendapatkan dana dari APBD sebesar Rp 2.639.688.521, melaksanakan 6 (enam) Program dan 26 (dua puluh enam) Kegiatan. Program yang dilaksanakan oleh Kecamatan Ngargoyoso sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

- c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
 - Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
- 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- 4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - Sinergitas dengan Kerpolisasi Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
- 5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
 - Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
- 6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

B. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas ini adalah

:

1. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2024;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2024;
6. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan;
7. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026;
8. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2024;
9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 19 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2024.

C. Maksud dan Tujuan

1) Maksud Penyusunan Laporan

- Sebagai bentuk penyampaian harapan OPD Kecamatan Ngargoyoso untuk bisa mencapai program / kegiatan yang dilaksanakan dan tanggungjawab OPD Kecamatan Ngargoyoso atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang telah diberikan.

2) Tujuan Penyusunan Laporan

- Sebagai laporan pencapaian program dan kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Ngargoyoso yang didasarkan pada Rencana Kerja Tahunan Tahun 2024;

- Menginformasikan pencapaian indikator tahunan Kecamatan Ngargoyoso yang berkaitan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta program kegiatan;
- Untuk mempertanggungjawabkan dan menjelaskan capaian keberhasilan dan kegagalan program kerja yang telah dilaksanakan selama 1 (satu) tahun anggaran.

BAB II

DESKRIPSI UNIT KERJA

A. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan merupakan koordinator penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Camat membawahi 5 (lima) orang kepala seksi yaitu Kepala Seksi Tata Pemerintahan, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban, Kepala Seksi Pelayanan Umum dan 1 (satu) Sekretaris. Sekretaris dibantu oleh Kasubag Umum dan Kepegawaian serta Kasubag Perencanaan dan Keuangan.

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Dalam melaksanakan tugasnya, camat mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan keteriban umum, penegakan Peraturan Daerah, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah ditingkat kecamatan;
- c. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;
- d. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Camat menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kecamatan maupun dalam hubungan antar instansi di Daerah. Camat bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan pengarahan serta pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan.

Dalam tugasnya sebagai pelaksana penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat dan desa,

Camat Ngargoyoso mengoptimalkan semua sumber daya yang ada guna peningkatan kualitas pelayanan dan pelaksanaan birokrasi pemerintahan yang akuntabel, bersih dan berwibawa. Hal ini sebagai langkah untuk mendukung keberhasilan program-program pemerintah daerah dan sebagai upaya pencapaian visi.

B. STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan pedoman atau acuan bagi Kecamatan Ngargoyoso untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan sebagai alat penilaian kinerja berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif dan prosedural sesuai tata kerja dan prosedur.

Di Kecamatan Ngargoyoso telah diberlakukan 7 (tujuh) SOP Pelayanan Publik, yaitu :

1. SOP Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP)
2. SOP Pemuatan Kartu Keluarga (KK)
3. SOP Pembuatan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)
4. SOP Pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
5. SOP Dispensasi Nikah
6. SOP Administrasi Pengajuan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)
7. SOP Administrasi Legalisasi Surat Pengantar

C. PERDA/PERBUB YANG BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Dasar pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Ngargoyoso adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2024;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2024;
3. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2024;

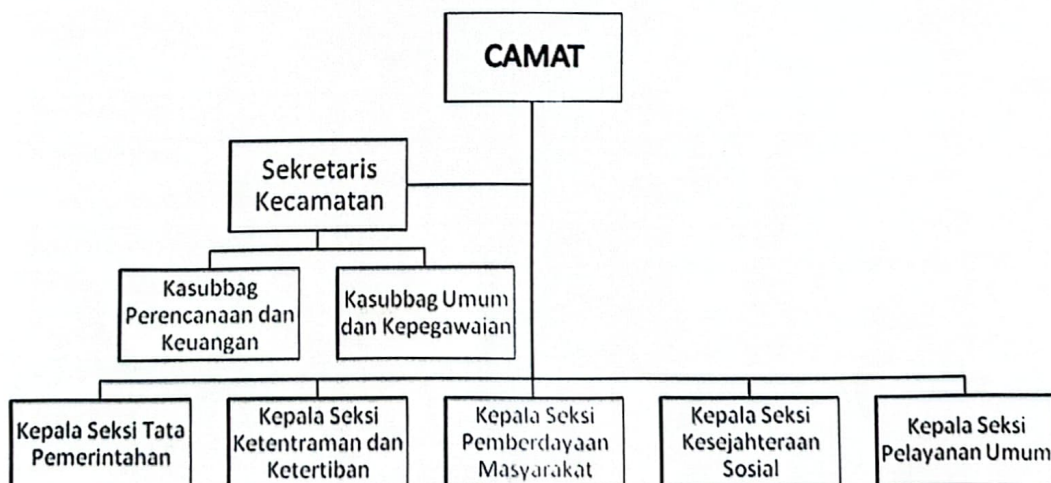
4. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 19 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2024.

D. STRUKTUR ORGANISASI

Susunan Organisasi Kecamatan sesuai Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 Tahun 2016 pasal 3 terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Seksi Tata Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial;
- g. Seksi Pelayanan Umum; dan
- h. Kelurahan.

Bagan Struktur Organisasi Kecamatan adalah sebagai berikut :



E. KEPEGAWAIAN

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pada tahun 2024 Kecamatan Ngargoyoso didukung oleh 12 (Dua belas) PNS dan 24 (dua

puluh empat) orang tenaga harian lepas. Adapun komposisinya dapat dilihat pada daftar-daftar berikut.

1. DAFTAR PEGAWAI KEC. NGARGOYOSO TH. 2024

NO	NAMA	NIP	STATUS KEPEGA WAIAN	PANGKAT/ GOL
1	Wahyu Agus Pramono, S.STP	198001181999121001	PNS	Pembina (IV/a)
2	Wiyono, S.Sos, M.Si		PNS	Pembina (IV/a)
3	Dian Antony, S.E., M.M.	197909252006042007	PNS	Pembina (IV/a)
4	Budiharjo, S.Sos	196909231990021001	PNS	Penata Tk. I (III/d)
5	Triyono, S.Sos	197411191993031001	PNS	Penata Tk. I (III/d)
6	Heru Sriyono, S.E	198012102011011009	PNS	Penata Tk. I (III/d)
7	Margono, S.Sos	196910232009061001	PNS	Penata Muda (III/b)
8	Agus Harjono, S.Sos	197401192007011008	PNS	Penata Muda (III/b)
9	Nunus Catur W.	198012132009021003	PNS	Pengatur (II/c)
10	Sujadi	196906232009011004	PNS	Pengatur (II/c)
11	Maryanto	1980052120100101002	PNS	Pengatur Muda (II/a)
12	Agus Dwi Fajar V	198502112010011001	PNS	Pengatur Muda (II/a)
13	Sri Sumarwan		THL	
14	Agus Supasa		THL	
15	Frisky Louise Martha		THL	
16	Listiono Dwi Santoro		THL	
17	Endri Andayani		THL	
18	Anggih		THL	
19	Agus Wahyudi		THL	
20	Agus Budi		THL	
21	Joko Priyono		THL	
22	Rizky		THL	
23	Sunarto		THL	
24	Isti Ariviani		THL	
25	Dodik Arie		THL	
26	Suci Sekar		THL	
27	Koco		THL	
28	Ricky		THL	

29	Hadziq		THL	
30	Desi Pratama		THL	
31	Abdurohlim		THL	
32	Gilang		THL	
33	Bagas		THL	
34	Jentik Jelita		THL	
35	Farida		THL	
36	Rina Purnamasari		THL	

2. DAFTAR PEJABAT STRUKTURAL KEC. NGARGOYOSO YANG TERISI

NO	NAMA	JABATAN STRUKTURAL	MEMENUHI PERSYARATAN DIKLATPIM	MEMENUHI SYARAT KEPANGKATAN
1	Wahyu Agus Pramono, S.STP	Camat	Memenuhi	Memenuhi
2	Wiyono, S.Sos	Sekretaris Camat	Memenuhi	Memenuhi
3	Dian Antony, S.E, M.M	Kasi Tata Pemerintahan	Memenuhi	Memenuhi
4	Budiharjo, S.Sos	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Memenuhi	Memenuhi
5	Triyono, S.Sos	Kasi Pelayanan Umum	Memenuhi	Memenuhi
6	Heru Sriyono, S.E	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Memenuhi	Memenuhi
7	Margono, S.Sos	Kasi Kesejahteraan Sosial	Memenuhi	Memenuhi
8	Agus Harjono, S.Sos	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Memenuhi	Memenuhi
9	Sri Winarsih	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Memenuhi	Memenuhi

3. DAFTAR PEJABAT STRUKTURAL KEC.NGARGOYOSO YANG BELUM TERISI

NO	JABATAN STRUKTURAL	ESELON
	NIHIL	

4. DAFTAR PEJABAT FUNGSIONAL KEC. NGARGOYOSO (UMUM)

NO	NAMA	NIP	NAMA JABATAN FUNGSIONAL
1	Nunus Catur W.	198012132009021003	Pengelola Administrasi Pemerintahan pada Seksi Tata Pemerintahan
2	Sujadi	196906232009011004	Pengelola Kepegawaian pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3	Maryanto	198005212010011002	Bendahara Pengeluaran pada Kecamatan Ngargoyoso
4	Agus Dwi Fajar V	198502112010011001	Pengadministrasi umum pada sub bagian Umum dan Kepegawaian

5. DAFTAR PEJABAT FUNGSIONAL KEC. NGARGOYOSO YANG BELUM TERISI

NO	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	JUMLAH
1	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1
2	Pengelola Kesejahteraan Sosial pada Seksi Kesejahteraan Sosial	1
3	Pengelola Administrasi Pemerintahan pada Seksi Tata Pemerintahan	1
4	Pengolah Data Pelayanan pada Seksi Pelayanan Umum	1

BAB III**CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)****A. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR***Nihil***B. URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR***Nihil***C. URUSAN PILIHAN***Nihil***D. URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG***Nihil*

BAB IV

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	KBJK. STRA.	PROGRAM DAN KEGIATAN	URAIAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		a. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PE MERINTAHAN DAERAH KAB UPATEN/KOT A, Kegiatan Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Anggaran: Rp. 1.276.700,00 Realisasi: Rp. 1.276.700,00 Persentase: (100,00%)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 laporan	3 (100.00%)		
			b. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PE MERINTAHAN DAERAH KAB UPATEN/KOT A, Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	1) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Anggaran: Rp. 41.787.500,00 Realisasi: Rp. 41.637.500,00 Persentase: (99,64%)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi 2 unit	2 (100.00%)		

		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
	c.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PE MERINTAHAN DAERAH KAB UPATEN/KOT A, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1)	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Anggaran: Rp. 2.117.000,00 Realisasi: Rp. 2.117.000,00 Persentase: (100,00%)	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 12 dokumen	12 (100.00%)	
	d.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PE MERINTAHAN DAERAH KAB UPATEN/KOT A, Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1)	Pengadaan Aset Tetap Lainnya Anggaran: Rp. 17.000.000,00 Realisasi: Rp. 16.225.000,00 Persentase: (95,44%)	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya 3 unit	3 (100.00%)	
			2)	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Anggaran:	Jumlah unit Kendaraan Dinas	1 (100.00%)	

			Rp. 25.000.000,00 Realisasi: Rp. 23.951.793,00 Persentase: (95,81%)	Operasional atau Lapangan 1 unit			
			3) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Anggaran: Rp. 49.700.000,00 Realisasi: Rp. 49.400.000,00 Persentase: (99,40%)	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya 11 unit	11 (100.00%)		
	e. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PE MERINTAHAN DAERAH KAB UPATEN/KOT A, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1)	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Anggaran: Rp. 1.320.000,00 Realisasi: Rp. 1.320.000,00 Persentase: (100,00%)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan 12 dokumen	12 (100.00%)		
		2)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor Anggaran: Rp. 15.000.000,00 Realisasi: Rp. 15.000.000,00 Persentase: (100,00%)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 jumlah	12 (100.00%)		

			3)	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Anggaran: Rp. 6.234.400,00 Realisasi: Rp. 6.234.400,00 Persentase: (100,00%)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan 12 paket	12 (100.00%)		
	f.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PE MERINTAHAN DAERAH KAB UPATEN/KOT A, Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Anggaran: Rp. 1.753.999.571,00 Realisasi: Rp. 1.710.072.991,00 Persentase: (97,50%)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 15 orang/bulan	14 (93.33%)		
	g.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PE MERINTAHAN DAERAH KAB UPATEN/KOT A, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Anggaran: Rp. 24.600.000,00 Realisasi: Rp. 21.314.014,00 Persentase: (86,64%)	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 dokumen	12 (100.00%)		

			2)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Anggaran: Rp. 52.200.000,00 Realisasi: Rp. 52.200.000,00 Persentase: (100,00%)	Jumlah Penyediaan Jasa dan Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 paket	12 (100.00%)		
		h. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PE MERINTAHAN DAERAH KAB UPATEN/KOT A, Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Anggaran: Rp. 41.955.500,00 Realisasi: Rp. 40.305.369,00 Persentase: (96,07%)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang di pelihara dan dibayarkan Pajaknya dan Perizinannya 4 unit	4 (100.00%)		
		i. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PE MERINTAHAN DAERAH KAB UPATEN/KOT A, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang	1)	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Anggaran: Rp. 56.400.000,00 Realisasi: Rp. 56.400.000,00 Persentase: (100,00%)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang Disediakan 12 dokumen	12 (100.00%)		

	Urusan Pemerintahan Daerah						
j.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN UPATEN/KOTA, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Anggaran: Rp. 5.898.350,00 Realisasi: Rp. 5.898.350,00 Persentase: (100,00%)	Jumlah Paket Komponen Listrik dan Instalansi Kantor 12 jumlah	12 (100.00%)		
		2)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Anggaran: Rp. 21.689.300,00 Realisasi: Rp. 21.689.300,00 Persentase: (100,00%)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12 jumlah	12 (100.00%)		
		3)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Anggaran: Rp. 91.915.000,00 Realisasi: Rp. 91.175.000,00 Persentase: (99,19%)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 dokumen	12 (100.00%)		
k.	PROGRAM PENUNJANG	1)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	3 (100.00%)		

		URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN UPATEN/KOTA, Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Anggaran: Rp. 2.216.750,00 Realisasi: Rp. 2.216.750,00 Persentase: (100,00%)	Perencanaan Perangkat Daerah 3 dokumen			
--	--	---	--	--	--	--	--

B. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR*Nihil***C. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR***Nihil***D. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN***Nihil***E. UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN***Nihil***F. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN***Nihil***G. UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN***Nihil***H. UNSUR KEWILAYAHAN**

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	KBJK. STRA.	PROGRAM DAN KEGIATAN	URAIAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI
--------	------------------------	----------------	-------------------------	---------------------	--------	-----------	--------------	--------------------

						PERMASALAHAN
1. KECAMATAN	a. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA, Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1)	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Anggaran: Rp. 67.360.000,00 Realisasi: Rp. 67.360.000,00 Persentase: (100,00%)	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tat Pemerintahan Desa 12 dokumen	12 (100.00%)	
		2)	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Anggaran: Rp. 2.800.000,00 Realisasi: Rp. 2.800.000,00 Persentase: (100,00%)	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 12 dokumen	12 (100.00%)	
	b. PROGRAM P ENYELENGG ARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK,	1)	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Anggaran: Rp. 36.263.450,00 Realisasi: Rp. 36.263.450,00	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di	12 (100.00%)	

	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase: (100,00%)	Wilayah Kecamatan 12 dokumen			
	c. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM, Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	1) Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Anggaran: Rp. 42.100.000,00 Realisasi: Rp. 42.100.000,00 Persentase: (100,00%)	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional 25 orang	25 (100.00%)		
		2) Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Anggaran: Rp. 68.560.000,00 Realisasi: Rp. 68.560.000,00 Persentase: (100,00%)	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 70 jumlah	70 (100.00%)		

	d. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN, Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1)	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Anggaran: Rp. 64.845.000,00 Realisasi: Rp. 64.845.000,00 Persentase: (100,00%)	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 dokumen	12 (100.00%)		
		2)	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Anggaran: Rp. 3.750.000,00 Realisasi: Rp. 3.750.000,00 Persentase: (100,00%)	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 5 jumlah	5 (100.00%)		
	e. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM, Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1)	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Anggaran: Rp. 143.700.000,00 Realisasi: Rp. 143.700.000,00 Persentase: (100,00%)	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12	12 (100.00%)		

laporan

I. UNSUR PEMERINTAHAN UMUM*Nihil***J. UNSUR KEKHUSUSAN***Nihil*

BAB V

TUGAS PEMBANTUAN PEMERINTAH PUSAT, PROPINSI DAN DESA

A. TUGAS PEMBANTUAN DARI PEMERINTAH PUSAT YANG DILAKSANAKAN

PEMERINTAH KABUPATEN

N o	Kement erian/ LPNK	Dasar Hukum	Program Kegiatan	Output	Lokasi	Alokasi	Kinerja	Keteran gan
Nihil								

B. TUGAS PEMBANTUAN DARI PEMERINTAH PROVINSI YANG

DILAKSANAKAN PEMERINTAH KABUPATEN

N o	Bidang Urusan	Dasar Hukum	Program Kegiatan	Output	Lokasi	Alokasi	Kinerja	Keteran gan
Nihil								

C. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN KEPADA DESA

N o	Kabupa ten	Dasar Hukum	Program Kegiatan	Output	Lokasi	Alokasi	Kinerja	Keteran gan
Nihil								

BAB VI**STANDAR PELAYANAN MINIMAL****1. Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM**

No	Jenis	Indikator Kinerja Penerima			Mutu Minimal			Kterang an
		Indikator	Target	Batas	Indikator	Target	Batas	

3. Indeks Pencapaian (IP) SPM

BAB VII
INOVASI DAN PENGHARGAAN

A. INOVASI

No.	Nama Inovasi	Deskripsi
-----	--------------	-----------

B. PENGHARGAAN

No.	Nama Penghargaan	Instansi Pemberi Penghargaan
-----	------------------	------------------------------

BAB VIII PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pada Tahun 2024 secara umum program dan kegiatan yang telah direncanakan di Kecamatan Ngargoyoso dapat berjalan dengan baik dan pencapaian rata-rata 98,03%. Pelaksanaan kegiatan Kecamatan Ngargoyoso hanya mendapat alokasi dari APBD Kabupaten Karanganyar. Alokasi dana tersebut telah dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan.

Dengan demikian, Kecamatan Ngargoyoso telah melaksanakan tugas berdasarkan kewenangan yang dimiliki seperti koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, ketentraman dan ketertiban, kesejahteraan sosial, pelayanan umum serta penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan.

B. SARAN

Untuk peningkatan bidang pelayanan masyarakat, sangat diperlukan peningkatan kualitas SDM secara bertahap, berjenjang dan berkelanjutan. Sehingga tingkat pemahaman serta pengetahuan perangkat kecamatan dapat mengikuti perkembangan baik dari segi peraturan yang harus diterapkandan ketertiban administrasi birokrasi serta standar mutu pelayanan masyarakat.

Demikian Laporan Pelaksanaan Tugas Tahun 2024 ini kami sampaikan untuk menjadikan periksa.

Ngargoyoso, Januari 2025

Pin. Camat NGARGOYOSO



NIP.19670509 198903 1 010